



EKOLOGI POLITIK

Dimana Ekonominya?

oleh: Murat Arsel
International Institute of Social Studies

Janji Ekologi Politik yang Tak Terpenuhi

Ranah ekologi politik, sejak permulaannya selama kurun waktu 1970an dan 1980an, telah berkembang dengan stabil sehingga mengisi tempat terkemuka dalam studi lingkungan. Secara sederhana, dua kontribusi utama dari ekologi politik dapat diringkas pertama: sebagai perhatiannya kepada 'skala', yang memungkinkan para ilmuwan untuk mengidentifikasi dan menganalisa rantai yang menghubungkan dinamika lingkungan dengan kekuatan-kekuatan sosial, politik, budaya dan ekonomi pada berbagai situs konseptual dan fisik, dan kedua: fokusnya yang konsekwen pada 'kuasa' dalam berbagai perwujudannya sebagai kunci pusat untuk memahami bagaimana gagasan tentang kesinambungan diciptakan dan disebar (Neumann 2005; Robbins 2003). Dalam catatan singkat ini, tanpa mengabaikan kontribusi penting ini, saya berpendapat bahwa politik ekologi sejauh ini belum memenuhi janjinya karena gagal memberikan 'peta jalan' - ideologis

maupun operasional - kearah pembangunan *ekonomi* berkelanjutan yang adil dan merata. Kegagalan ini berasal dari kelemahannya dalam bidang ekonomi politik (*political economy*) yang pada awalnya menjadi tonggak dasar politik ekologi tetapi selanjutnya dikalahkan kepentingannya oleh politik dan ekologi.

Pendekatan Teoritis

Bidang ekologi politik muncul ketika para ahli lingkungan mulai mengandalkan konsep-konsep ekonomi politik yang berasal dari kepedulian strukturalis dan materialis. Pendekatan yang dihasilkan membantu mengungkapkan kaitan-kaitan antara dinamika lingkungan setempat dengan proses politik dan ekonomi yang lebih luas (Peet and Watts, 1996; 2004). Terobosan analitis ini memungkinkan para ahli ekologi politik untuk menelusuri dengan teliti, misalnya, kaitan-kaitan antara masalah degradasi tanah setempat dan masalah-masalah lebih luas seperti kemiskinan, ketunakismaan (*landlessness*), keterbelakangan, hubungan neo-kolonial, dan marjinalisasi politik dan ekonomi (Blaikie and Brookfield, 1987).

Berangkat dari ranah studi pembangunan kritis (*critical development studies*), studi ekologi politik menilai bahwa keputusan pengelolaan sumber daya alam tidak bisa dipahami hanya dari sudut pandang teknis yang memprioritaskan efisiensi. Sebaliknya, seperti pendapat Adams, “‘kehijauan’ dari perencanaan pembangunan akan ditemukan bukan dalam kepeduliannya dengan ekologi atau lingkungan di dalam dirinya, tetapi dalam keprihatinannya dengan masalah kendalian, kekuasaan, dan kedaulatan” (1990: 253). Penemuan-penemuan utama teori ekologi politik mengutarakan bahwa pola-pola pengembangan sumber daya muncul dari interaksi antara sistem alam (misalnya kualitas, kuantitas, dan lokasi air) dan sistem sosial (misalnya penyebaran kekuasaan ekonomi, sosial, dan politik) dalam suatu masyarakat).

Banyak literatur telah dicurahkan untuk menggambarkan batas-batas ekologi politik, yang lebih baik digambarkan sebagai suatu ‘pendekatan teori’ daripada sebuah ‘teori’, untuk mengasah kategori-kategori konseptualnya yang dipinjam terutama dari geografi dan antropologi, dan untuk memperdalam analisisnya dari perubahan lingkungan kontemporer di seluruh dunia. Selama periode ini, beberapa kritik telah diarahkan pada pustaka ekologi politik. Mengingat sifatnya yang lintas-disiplin dan integratif, sebagian besar kritik ini telah dirumuskan dalam bentuk ‘terlalu banyak’nya atau ‘tidak cukup’nya komponen konseptual atau disiplin tertentu.

Beberapa pengamat berpendapat bahwa ekologi politik telah tersesat terlalu jauh ke arah analisis kekuasaan dengan mengorbankan pemahaman ekologi yang jelas dan rinci (Vayda and Walters, 1999; Zimmerer, 2000). Sebagai contoh, Walker (2005) menantang kemampuan ‘ekologis’ dari ekologi politik, dengan

mengeluh bahwa para pendukungnya terlalu asyik berpikir tentang pemahaman struktur sosial dan tidak memberikan perhatian seperlunya untuk memahami dan mendokumentasikan perubahan lingkungan, yang tidak selalu merupakan akibat dari sumber-sumber ekonomi dan politik. Di sisi lain, para ilmuwan terutama yang berasal dari geografi mengkritisi teks-teks klasik tertentu dalam ekologi politik sebagai kurang dipolitisasi, dengan kata lain karena tidak memberikan perhatian eksplisit pada ‘politik’, dalam arti Marxisnya yaitu kritik terhadap kapitalisme. Peet dan Watts, misalnya, mengkritik karya kunci Piers Blaikie *Land Degradation and Society* (‘Kerusakan Lahan dan Masyarakat’) sebagai terlalu banyak berfokus pada lahan/tanah dan kurang memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan kapitalis di daerah-daerah pinggiran. Penulis-penulis lain mengangkat masalah relevansi kebijakan politik ekologi, dengan menekankan kebutuhan untuk membuat wawasan yang bermanfaat tidak hanya untuk sesama akademisi, tetapi juga untuk para praktisi dan pembuat kebijakan (Neumann 2008). Penting untuk dicatat bahwa proses ini telah mengakibatkan debat paralel di kalangan ahli ekologi politik tentang apa artinya menjadi ahli ekologi politik dan apakah ranah ini kurang memiliki sistematika. Selama ini belum ada pemecahan yang jelas, sehingga uraian Robbins tentang ekologi politik sebagai (hanya) “*sesuatu yang dilakukan orang*” (2004:13) tampaknya mencerminkan konsensus umum.

Kritik yang Hilang

Anehnya, suatu kesenjangan pokok yang tumbuh berkembang dalam politik ekologi tetap diabaikan baik oleh para pengkritik dan pendukung ekologi politik. Yakni, konsep *ekonomi* politik, yang menjadi tonggak penting dalam pengembangan awalnya, secara berangsur-angsur telah dihilangkan dari wacana ekologi politik. Ini tidak berarti bahwa ekologi politik hanya tertarik pada ‘politik’ dan ‘ekologi’; sebagian besar pustaka ekologi politik justru berkaitan langsung dengan dampak dari perkembangan kapitalisme global. Khususnya kajian rantai komoditi (*commodity chains*) telah mengembangkan pengertian yang sangat canggih tentang bagaimana pembangunan kapitalis mengemas barang-barang dan alam ke dalam kategori-kategori rapih yang dapat diperdagangkan dan ditukar demi mengejar keuntungan. Adapun bagian lain dari pustaka ekologi politik yang menghasilkan kritik pedas terhadap neo-liberalisme, sebagai perwujudan kontemporer kapitalisme di kebanyakan dunia saat ini. Namun, kedua aliran ini yang mengandalkan wacana ekonomi politik masih gagal untuk menangani dua dimensi ekonomi yang mendasar untuk menciptakan ekonomi global yang berkelanjutan yang seimbang bukan hanya secara ekologis tetapi juga secara sosial dan ekonomis. Kedua dimensi ini adalah (1) dimensi ‘ideologis’, yang berarti menciptakan visi dunia menyeluruh dan (2) dimensi

'keseharian', dalam hal ini merujuk kepada pengalaman sehari-hari orang umum/awam, terutama yang miskin dan yang dirampas haknya. Tanpa kedua komponen ini, ekologi politik secara umum tetap menjadi alat untuk mengkritik belaka – walaupun secara tajam—dan gagal untuk memenuhi potensi transformatifnya.

Dimensi ideologis yang kurang dalam ekologi politik mengacu pada ketiadaan keterlibatan 'meta-teoretis' dengan ekonomi global kontemporer. Walaupun ahli ekologi politik mendokumentasikan dan membuktikan berbagai masalah pembangunan kapitalis dengan sangat mahir – baik yang bersifat struktural maupun yang menjadi efek sampingan -- belum ada upaya yang besar untuk membangun visi dunia alternatif yang dapat membantu memulai proses perubahan sistemik. Walaupun (banyak) para ekologi politik bersikukuh bahwa bentuk-bentuk pemikiran Marxislah yang menjadi dasar analisis mereka, namun hal ini tidak serta-merta atau secara otomatis memecahkan masalah ketiadaan visi dunia. Konfigurasi yang tepat dari sosialisme pada masa depan tidak diuraikan dengan baik, sehingga kemampuannya untuk menggapai keberlanjutan tidak bisa dipastikan. Dengan pengecualian karya James Bellamy-Foster (2002) dan Martin O'Connor (1994), hampir tiada ahli lingkungan kontemporer yang mengangkat masalah bagaimana suatu gerakan anti-kapitalisme dapat pula menjadi gerakan pro-sosialisme.

Jika sebagian besar penelitian ekologi politik membuktikan bahwa keberlanjutan di tingkat global hampir selalu tergantung pada penanganan masalah-masalah lokal secara konsekwen – apakah masalahnya bersifat ekologis, sosial atau ekonomis – ini belum membantu menunjukkan jalan menuju keberlanjutan pada era ini dimana majunya teknologi telah mengubah makna 'lokal' itu maupun bentuk hubungan antara situs-situs lokal. "Kejeniusan" kapitalisme adalah bahwa kapitalisme tidak hanya menciptakan realitas keterkaitan yang baru ini, tapi juga membantu mengaturnya secara sungguh-sungguh efisien. Sampai kini, kaum ekologis politik hanya mampu mendokumentasikan proses ini tapi belum memulai proses memformulasi sebuah jalan alternatif yang realistis.

Turut hilang pula sebuah pendekatan inovatif yang bisa membuka jalan kearah sebuah tatanan ekonomi politik yang bisa menciptakan kesinambungan. Hampir semua ide kontemporer untuk menangani permasalahan lingkungan secara inovatif telah diinspirasi oleh diktat ekonomi neo-klasik yang pada dasarnya mereduksi kealamian menjadi komoditas dan masyarakat menjadi konsumen-konsumen individual.

Dengan demikian tidak mengejutkan jika dua inisiatif yang paling luas dibicarakan pada era kita ini – pembayaran layanan ekosistem (*payments for ecosystem services*) dan Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism*)- dua-duanya berangkat dari prinsip motif keuntungan. Kontribusi utama dari kaum ekologis politik dalam perdebatan ini adalah pendapat bahwa usaha ini tidak mungkin efektif, dan lagipula tidak adil. Walaupun kritik ini sangat tepat, pemecahan-pemecahan alternatif perlu dikembangkan atau paling tidak diinspirasi dengan penelitian ekologi politik.

Ini tidak berarti bahwa ekologis politik tidak menyadari bahwa bidang mereka masih kurang suatu unsur esensial. Beberapa komentator mengeluh, tidak adanya sebuah slogan yang jelas seperti '*tragedy of the commons*' (tragedi hak komunal), mencegah ekologi politik untuk lebih berpengaruh dalam lingkungan kebijakan. Bagaimanapun, yang dibutuhkan bukanlah naratif sederhana yang menjelaskan mengapa krisis lingkungan global mengganjal, tapi sebuah naratif yang menunjukkan seperangkat langkah konkrit kearah sebuah realita alternatif. Dengan kata lain, kekurangan ekologi politik terletak dalam kegagalannya untuk menguraikan krisis lingkungan global dengan cara yang tidak membutuhkan mekanisme pemecahan yang dipinjam dari kebijakan neo liberal.

Sehubungan dengan kelemahannya dalam memformulasi sebuah strategi perlawanan terhadap neo liberal, ekologi politik belum mampu menerangkan realita kasar dari keterbelakangan ekonomi. Ini tidak berarti bahwa ekologis politik tidak mampu mendokumentasikan bagaimana penetrasi kekuatan-kekuatan modern telah merombak dinamika bermasyarakat maupun proses ekologi serta menciptakan kemelaratan ekonomi (misalnya diantara kaum tani) dan kerusakan lingkungan secara luas-luas. Namun studi ekologi politik, umumnya, gagal bergulat dengan kenyataan bahwa pembangunan ekonomi, dengan segala kekurangannya, tetap menjadi wacana yang berlaku luas, baik sebagai ideologi maupun sebagai proses sejarah. Dengan fokusnya pada "politik", ekologi politik telah mengidentifikasi kemiskinan dan ketidak setaraan sebagai problem sentral dari negara-negara dunia ketiga. Dengan fokusnya pada 'ekologi', bidang ini menunjukkan bukan hanya adanya krisis lingkungan global tetapi juga bahwa krisis ini merupakan bagian integral dari krisis kemiskinan. Namun demikian, ekologi politik tetap menjadi buta, karena tidak bisa melihat bahwa pembangunan *ekonomi* - dalam bentuk apapun - tetap merupakan satu-satunya solusi yang diidamkan kaum miskin..



Dilihat sepintas, ekologi politik tampaknya berada dalam posisi baik untuk menghadapi dilema ini (bahwa kaum miskin, yang kemelarannya adalah akibat pembangunan ekonomi global yang ganjil yang selain memiskinkan juga menghancurkan sumber alam mereka, tetap membutuhkan 'pembangunan', meskipun dalam bentuk yang sangat berbeda). Tendensi pos-struktural dalam ekologi politik telah mendorong konstruksi sebuah naratif yang mengistimewakan 'lokalitas' dan 'pengalaman yang terasa' (*felt experience*) lebih dari naratif meta yang dipaksakan dari atas. Namun, ekologis politik belum mampu mengakui bahwa pembangunan berkelanjutan tetap merupakan sebuah penempatan dari atas yang sulit direkonsiliasikan dengan kebutuhan sehari-hari manusia yang sering dapat dipenuhi dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat (dan destruktif).

Walaupun beberapa ekologis politik telah membahas isu ini, mereka sekali lagi hanya membatasi diri pada dimensi ekologi. Argumen Ramachandra Guha (2000) dan Martinez-Alier (2003) tentang 'environmentalismnya kaum miskin' sebagai contoh, mengakui bahwa rakyat miskin memiliki konsep dan praktek etika lingkungan yang berbeda dengan orang kaya karena naluri 'konservatif' mereka. Dengan kata lain, bahwa orang miskin adalah pemerhati lingkungan karena kehidupan dan ketahanan mereka bergantung pada pengawetan bukan hanya dari lingkungan fisik di sekitar mereka (contoh: tanah untuk pertanian) tetapi juga mata pencaharian nafkah dari lingkungan itu (contoh: cara-cara bertani tradisional). Akan tetapi, ini hanya menggambarkan sebagian saja dari kenyataan. Aspek yang tidak diuraikan jelas oleh Guha dan Martinez-Alier, dan yang selalu gagal dikoreksi kaum ekologis politik, adalah dimensi pembangunan dalam etik konservatif ini. Adalah sebuah kesalahan jika kita mengasumsikan bahwa orang miskin mengawetkan sumber alam semata-mata untuk berjuang bertahan hidup. Perjuangan bertahan hidup dalam konteks ini bukanlah sebuah tujuan sendiri. Lebih dari itu, perjuangan bertahan hidup adalah cara untuk mempertahankan aspirasi pembangunan. Memilih konservasi sambil menolak proyek-proyek pembangunan tertentu tidak berarti penolakan pembangunan secara umum. Pilihan dan penolakan mereka hanya mengarisbawahi ketiadaan sebuah visi pembangunan alternatif yang bersifat emansipatori dan realistis, yang bisa menggantikan dominasi visi neo liberal.

Sebuah Jalan Keluar?

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa hegemoni neo liberalisme dan ketidakmampuan ekologi politik untuk mengkonfrontasi realita ini dengan penuh, merupakan hambatan penting dalam mentransisikan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Sebaliknya, ekologis politik telah gagal melawan visi global pembangunan neo liberal dengan analisis yang jernih dari akar krisis lingkungan

global atau peta petunjuk jalan menuju pada visi alternatif yang lebih berkelanjutan. Tidak adanya sebuah visi semacam itu berarti bahwa naratif ekologi politik tentang kenyataan-kenyataan lokal kurang meyakinkan karena kurang memperhitungkan kehausan rakyat miskin akan pembangunan *ekonomi*, yang tidak akan tercapai dengan model kontempora pembangunan global.

Dalam ketiadaan inilah, sebuah beban besar jatuh ke lengan para akademisi dan aktivis. Biarpun kritik selalu menjadi senjata ampuh mendorong perubahan, sekarang perlu bergerak lebih maju kearah pendekatan eksperimental untuk melawan pembangunan neo liberal dan untuk menciptakan jalan alternatif kearah pembangunan *ekonomi* yang berkelanjutan secara ekologi.

Referensi

- Adams, W. (1990) *Green Development* London: Routledge.
- Blaikie, P. and H. Brookfield (1987) *Land degradation and society* Methuen: London.
- Bellamy-Foster, J. (2002) *Ecology against capitalism* Monthly Review Press: New York.
- Guha, R. (2000) *Environmentalism: A Global History*. Longman: New York.
- Martinez-Alier, J. *The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation*. Edward Elgar: Cheltenham, UK.
- Neumann, R.P. (2005) *Making Political Ecology*. Hodder Arnold: London.
- Neumann, R.P. (2008) "Probing the (in)compatibilities of social theory and policy relevance in Piers Blaikie's political ecology" *Geoforum* 39: 728-735
- O'Connor, M. ed., *Is Capitalism Sustainable*, Guilford Press: New York and London.
- Robbins, P. (2004) *Political Ecology: A critical introduction* Blackwell: Malden, MA.
- Peet, R. and M. Watts, eds., (1996) *Liberation ecologies: Environment, development, social movements* Routledge: London.
- Peet, R. and M. Watts, eds. (2004) *Liberation ecologies: Environment, development, social movements*, second edition, Routledge: London.
- Vayda, A.P. and B. Walters (1999) "Against political ecology" *Human Ecology* 27: 167-179
- Walker, P.A. (2005) "Political ecology: Where is the ecology" *Progress in Human Geography* 29: 73-82
- Zimmerer, K. (2000) "The reworking of conservation geographies: Nonequilibrium landscape and nature-society hybrids" *Annals of the American Association of Geographers* 90(2): 356-369